

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah salah satu sumber pendukung sebagai acuan ataupun perbandingan oleh peneliti terkait dengan fokus penelitian yang relatif sama. Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian.

##### **2.1.1. Anis Dwi, dkk. 2022. Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Industri Ekonomi Kreatif Sambal di Desa Jimbar, Kecamatan Pracimantoro. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.**

Penelitian berjudul Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Industri Ekonomi Kreatif Sambal di Desa Jimbar dilakukan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan dan faktor pendukung keberhasilan program pemberdayaan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini adalah Kepala Desa Jimbar, Kader PKK, dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang tergabung dalam pemberdayaan.

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pada pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi diinisiasi oleh pejuang muda Kabupaten Wonogiri bersama Kepala Desa Jimbar. Pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan 96 perempuan rawan sosial ekonomi di Desa Jimbar untuk membuat produk olahan kreatif sambal bernama sambal atau sambal jimbar. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor pendukung pemberdayaan adalah dana desa, dukungan kepala desa dan

jajaran, Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dan dukungan dari masyarakat Desa Jimbar kepada perempuan rawan sosial ekonomi yang tergabung.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan adalah pada pelaksanaan pemberdayaan yang diteliti, yaitu melalui industri kreatif sambar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi melalui kelompok wanita tani. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi yang akan diteliti. Lokasi pada penelitian ini berada di Desa Jimbar, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berlokasi di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

**2.1.2. Triana. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.**

Penelitian berjudul Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dilaksanakan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat desa wisata yang dirumuskan lebih lanjut untuk mengkaji tentang pelaksanaan lima aspek pemberdayaan menurut Suharto (2017). Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa wisata dilaksanakan oleh Kepala Desa Ponggok bersama masyarakat dengan mengoptimalkan potensi berupa sumber mata air yang ada di Desa Ponggok. Dalam pelaksanaan pemberdayaan, kelima aspek

pemberdayaan, yaitu aspek pemungkinan, aspek penguatan, aspek perlindungan, aspek penyokongan dan aspek pemeliharaan dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kelima aspek ini membuat pemberdayaan berjalan dengan maksimal dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terlaksana. Dari yang mulanya desa termiskin di Indonesia saat ini mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik nasional kategori pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti terletak pada objek penelitian, yaitu pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian yaitu di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berlokasi di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

**2.1.3. Akhmad Purnama. 2018. Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (*Empowerment of Women with Social Economical Vulnerability Through Family Welfare Improvement*) Kementerian Sosial RI.**

Penelitian berjudul Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dilakukan untuk mengetahui proses pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Objek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sepuluh orang perempuan rawan sosial ekonomi di Desa Triwidadi dan kepala desa Triwidadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam atau *in depth interview*.

Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan dilakukan melalui dua bentuk kegiatan, yaitu dengan membentuk kelompok sosial usaha ekonomi produktif sebagai wahana atau ruang jejaring/kerjasama yang dapat diakses untuk pengembangan prakasa/inisiatif. Bentuk pemberdayaan yang kedua adalah dengan memberi bimbingan motivasi, sosial, keterampilan termasuk bimbingan kewirausahaan dan inovasi. Hasil dari pelaksanaan pemberdayaan menunjukkan adanya perubahan perilaku, ada peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan pemahaman tentang bimbingan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kemiskinan pada keluarga perempuan rawan sosial ekonomi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul sedangkan penelitian yang dilakukan berada di Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Relevansi dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang dilaksanakan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Anis Dwi dkk	2022	Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Melakukan sasaran pemberdayaan yang sama, yaitu	Metode penelitian yang digunakan berbeda, yaitu

No.	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Melalui Industri Ekonomi Kreatif Sambar di Desa Jimbar, Kecamatan Pracimantoro	Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.	Kualitatif dengan Studi Kasus. Pemberdayaan yang akan diteliti berbeda, yaitu Pemberdayaan melalui Industri Ekonomi Kreatif Sambar. Lokasi Penelitian juga berbeda karena berlokasi di Desa Jimbar Kabupaten Wonogiri.
2.	Triana	2022	Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten	Metode penelitian yang digunakan sama, yaitu Kualitatif Deskriptif.	Perbedaan terletak pada sasaran pemberdayaan, yaitu pemberdayaan masyarakat desa wisata. Lokasi penelitian berbeda karena di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten.
3.	Akhmad Purnama	2018	Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan	Melakukan sasaran pemberdayaan yang sama, yaitu Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial	Perbedaan penelitian terletak pada pemberdayaan yang akan diteliti, yaitu pemberdayaan

No.	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kesejahteraan Keluarga	Ekonomi. Metode penelitian yang sama dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	melalui kesejahteraan keluarga. Lokasi penelitian juga berbeda berlokasi di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Bantul.

Dari tabel persamaan dan perbedaan di atas, dapat diketahui bahwa persamaan dari ketiga dengan penelitian yang dilakukan adalah fokus penelitian yang digunakan, yaitu pemberdayaan. Ketiganya memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang pemberdayaan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dari masing-masing lokasi.

Perbedaan penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian terdahulu adalah pada aspek yang diteliti. Penelitian pertama menggali tentang pelaksanaan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi secara umum, sedangkan pada penelitian ini menggali tentang proses pelaksanaan tahap pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi. Penelitian kedua menggali tentang aspek-aspek dalam pemberdayaan masyarakat dan penelitian ketiga menggali tentang bentuk kegiatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebaruan pada penelitian pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi di Desa Sawahan.

## **2.2. Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1. Teori tentang Pemberdayaan Masyarakat**

#### **2.2.1.1. Definisi pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Definisi pemberdayaan terus berkembang karena pengaruh teori-teori yang terus berkembang pula. Sumarjo dalam Endah (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah perubahan pengembangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemberdayaan juga peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumber daya dan digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Menurut Edi Suharto (2017), “pemberdayaan adalah proses dan tujuan”. Proses pemberdayaan diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya.

Mardikanto (2010) menjabarkan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya dilakukan untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki hidup masyarakat, baik dalam ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Wrihatnolo dan Dwijoyo (2007) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, berpusat pada masyarakat lokal, dan

melibatkan prinsip saling menghormati, kritis, kepedulian dan partisipasi, dan melalui proses tersebut orang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara akan sumber daya berharga memperoleh akses yang lebih besar dan memiliki kendali atas sumber daya tersebut.

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk memperdayakan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan mengembangkan potensi yang dimiliki.

#### **2.2.1.2. Tujuan Pemberdayaan**

Pemberdayaan bertujuan untuk merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta dapat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan (Edi Soeharto, 2017). Menjelaskan hal serupa, Mardikanto dalam Oktaviani (2019) menjabarkan enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*).

Kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa memperbaiki kelembagaan di wilayah pemberdayaan.

- b. Perbaikan usaha (*Better Business*).

Dengan adanya perbaikan pendidikan atau semangat untuk belajar, perbaikan aksesibilitas atau keterjangkauan, serta perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki usaha yang dijalankan.



c. Perbaikan pendapatan (*better Income*).

Adanya aktivitas dalam rangka perbaikan bisnis atau usaha di area binaan, maka diharapkan dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat binaan.

d. Perbaikan lingkungan (*Better Environment*).

Usaha perbaikan diartikan untuk memperbaiki pendapatan maka diharapkan masyarakat juga bisa memperbaiki lingkungan yang seringkali disebabkan oleh kemiskinan.

e. Perbaikan kehidupan (*Better Living*).

Perbaikan kehidupan merujuk pada keseimbangan antara pendapatan dan lingkungan yang membaik, maka diharapkan pola hidup masyarakat juga membaik.

f. Perbaikan masyarakat (*Better Community*).

Perbaikan masyarakat dapat terjadi apabila keseluruhan tujuan dapat dilaksanakan, sehingga diharapkan terjadi perbaikan secara keseluruhan.

### **2.2.1.3. Tahapan Pemberdayaan**

Dalam upaya pemberdayaan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai tahapan. Sebagai sebuah proses pemberdayaan dilaksanakan untuk perubahan ke tingkat yang lebih baik. Menurut Isbandi Rukminto Adi (2013) terdapat tujuh tahapan proses pemberdayaan. Ketujuh tahapan dalam proses pemberdayaan tersebut merujuk pada teori pemberdayaan yang dipaparkan oleh Lippit, Walson dan Westley dalam Isbandi Rukminto Adi (2013) bahwa “tahapan pemberdayaan merupakan tahapan yang siklikal yang berputar seperti siklus guna perubahan yang lebih baik”. Adapun tahapan proses pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan. Persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik secara formal maupun informal.

2. Tahap Pengkajian (*Assesment*)

Proses pengkajian dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan keluar dari masyarakat sendiri, dan petugas hanya memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang disampaikan.

3. Tahap Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap perencanaan, masyarakat turut berpartisipasi untuk berpikir tentang masalah dihadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap Formulasi Rencana Aksi (*Action Plan Formulation*)

Tahap formulasi rencana aksi adalah tahap untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan dilakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada.

#### 5. Tahap Implementasi Kegiatan (*Implementation*)

Tahap implementasi adalah tahap paling penting dalam pemberdayaan masyarakat, hal ini dikarenakan sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga.

#### 6. Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini pelibatan masyarakat sangat penting untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

#### 7. Tahap Terminasi (*Termination*)

Tahap terminasi merupakan tahap perpisahan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan karena masyarakat dianggap sudah mandiri dan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pemberdayaan.

### **2.2.2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan**

Menurut Mathew dalam Mardikanto (2014:105), “prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Adapun 4 (empat) prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Najati (2005) adalah :

a. Prinsip kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses pembelajaran.

b. Prinsip partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap tersebut memerlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang tidak mampu sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.

d. Prinsip berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya para pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Namun, secara perlahan dan pasti peran pendamping akan semakin berkurang bahkan hilang karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Disimpulkan bahwa sebuah pemberdayaan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan dilakukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pemberdayaan, sehingga pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

### **2.2.3. Tinjauan tentang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi**

#### **2.2.3.1. Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami individu. Menurut Edi Suharto (2017) kemiskinan dapat diakibatkan oleh ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan hidup maupun ketidakmampuan negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Menurut Friedman dalam Edi Suharto (2017) kemiskinan dalam kaitannya ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi modal atau aset produktif, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Berdasarkan pernyataan beberapa ahli, disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dimana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal secara layak yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kemiskinan yang berdampak pada permasalahan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar individu terjadi pada perempuan rawan sosial ekonomi.

### **2.2.3.2. Definisi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi**

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) merupakan salah satu jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kementerian Sosial menjabarkan bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Kementerian Sosial, 2012)

Kondisi dikatakan rawan sosial ekonomi karena tinggal dalam rumah tangga miskin dan sangat rawan terhadap masalah sosial dan ekonomi. Dari kesimpulan beberapa ahli, perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari hari.

### **2.2.3.3. Rawan Sosial dan Rawan Ekonomi**

Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang multidimensi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari pengangguran, upah minimum, hingga perlambatan laju pertumbuhan (Alwiyah, 2020). Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran.

Friedman dalam Suharto (2017) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial, seperti modal produktif dan aset, contohnya tanah, perumahan, peralatan, Kesehatan, sumber sumber keuangan seperti pendapatan dan kredit yang memadai, organisasi sosial dan politik dapat digunakan untuk mencapai kepentingan dan

tujuan bersama, pengetahuan, keterampilan serta informasi yang berguna untuk memajukan hidup.

Dari pendapat beberapa ahli disimpulkan bahwa kemiskinan dalam kerawanan sosial dan ekonomi adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Kerawanan ekonomi dan sosial pada perempuan bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktifitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

Kerawanan sosial pada perempuan rawan sosial ekonomi ditandai dengan peran ganda yang dialami perempuan. Peran sebagai seorang ibu rumah tangga, namun juga memiliki peran lain sebagai tulang punggung keluarga. Sehingga perempuan tidak dapat berkontribusi pada masyarakat sesuai peran yang dimiliki.

#### **2.2.3.4. Kriteria Perempuan Rawan Sosial Ekonomi**

Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS menyebutkan kriteria perempuan rawan sosial ekonomi. Adapun kriteria perempuan rawan sosial ekonomi adalah :

1. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi kebutuhan hidup layak.

### **2.2.3.5.Faktor Penyebab Perempuan Rawan Sosial Ekonomi**

Kwik Kian Gie (2001) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor dari dalam yang mempengaruhi perempuan rawan sosial ekonomi. Faktor tersebut adalah pendidikan rendah, tidak mempunyai keterampilan dan belum terjangkau oleh program pengentas kemiskinan. Selain itu penetapan kesetaraan gender dan keadilan gender juga menjadi faktor lainnya.

Kemampuan perempuan untuk memainkan peran ganda dalam rumah tangga, yaitu sebagai ibu rumah tangga/tulang punggung keluarga dalam pencari nafkah (tuntutan kebutuhan ekonomi) keluarga menjadi nyata bagi kaum perempuan yang hidup, tumbuh dan berkembang pada kalangan masyarakat modern. Perempuan sebagai kepala keluarga atau orang tua tunggal (*single*), tanpa kepemilikan kemampuan untuk memainkan peran ganda terlebih bagi kalangan kaum perempuan sebagai kepala keluarga atau orang tua tunggal. atau janda akan mengalami hambatan dan memenuhi berbagai bentuk kesulitan dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi apabila tidak mendapat pemberdayaan.

### **2.2.3.6.Definisi Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi**

Roesmidi dan Riza (2008) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (pemenuhan kebutuhan praktis) individu, pemberdayaan perempuan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial. Pemberdayaan perempuan berarti terfokuskan pada peningkatan keadaan dari perempuan itu sendiri. Pemberdayaan perempuan juga meliputi pemberdayaan



psikologi, sosial budaya, ekonomi dan politik yang berkaitan erat satu sama lain, karena dengan adanya jaringan Kerjasama diantaranya yang saling memberdayakan dapat tercipta perubahan berkelanjutan.

Kesimpulan dari beberapa ahli bahwa perempuan yang diberdayakan bukan berarti tidak mempunyai potensi ataupun kemampuan, namun belum memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan peluang yang ada guna mengelola potensi yang dimiliki. Sehingga pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi diharapkan sebagai upaya agar dapat lebih berdaya.

## **2.2.4. Teori tentang Pekerjaan Sosial**

### **2.2.4.1. Definisi Pekerjaan Sosial**

Menurut Zastrow dalam Edi Suharto (2017) pengertian pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menyatakan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Praktik pekerjaan sosial terbagi menjadi tiga, yaitu praktik mikro, mezzo dan makro.

Pekerjaan sosial adalah profesi yang memberikan bantuan melalui pengembangan interaksi sosial yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, tujuannya supaya dapat memperbaiki kualitas kehidupan individu, kelompok

maupun masyarakat dalam suatu kesatuan yang harmonis dan dapat mengembalikan keberfungsian sosial dari masing-masing individu.

#### **2.2.4.2.Fungsi Pekerjaan Sosial**

Seorang pekerja sosial dalam melaksanakan tugas pelayannya terfokus pada klien. Menurut Siporin dalam Huraerah (2011), fungsi pekerja seorang pekerja sosial adalah :

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia.
2. Menjamin memadainya standar-standar subsistensi kesehatan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan pekerja sosial dalam institusi sosial.
3. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial serta struktur institusi masyarakat.

Fungsi pekerja sosial berkaitan dengan pengembalian keberfungsian sosial individu, kelompok maupun masyarakat guna meningkatkan kebutuhan dasar. Fungsi pekerja sosial difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dengan peningkatan ketertiban sosial, serta struktur di masyarakat yang mengarah pada perbaikan fungsi sosial klien secara optimal sesuai dengan status dan peran sosialnya.

#### **2.2.4.3.Sistem Dasar Pekerjaan Sosial**

Dalam praktek pekerjaan sosial, terdapat empat sistem dasar. Pincus dan Minahan menjabarkan empat sistem dasar berikut ini

##### **1. Sistem Klien**

Sistem klien adalah orang atau kelompok orang yang meminta dan mendapatkan pelayanan oleh agen perubahan. Sistem klien adalah orang yang

diharapkan menerima pelayanan dari pelaksana perubahan dengan persetujuan kontrak.

## 2. Sistem Sasaran

Sistem sasaran merupakan sekumpulan orang atau organisasi yang memerlukan perubahan melalui pengukuran tertentu dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui agen perubahan.

## 3. Sistem Pelaksana Perubahan

Sistem pelaksana perubahan adalah sekumpulan profesional yang secara khusus bekerja untuk menciptakan perubahan secara terencana. Sistem pelaksana perubahan bertugas untuk memberikan bantuan atas dasar keahlian yang berbeda dan bekerja sama dengan sistem sumber lain.

## 4. Sistem Kegiatan

Sistem kegiatan merupakan pihak-pihak yang bekerjasama dengan pekerja sosial dalam upaya untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Sistem kegiatan juga merujuk pada orang-orang yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan perubahan.

### **2.2.4.4. Definisi Pekerjaan Sosial Komunitas**

Netting (2004) menyatakan bahwa pekerjaan sosial makro atau pekerjaan sosial komunitas merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana (*planned change*) dalam organisasi dan komunitas. Adapun praktik pekerja sosial makro merujuk pada suatu proses kerja dalam pekerjaan sosial yang berupaya untuk memberikan intervensi pada tingkatan keseluruhan kelompok atau populasi

sasaran. Praktik makro dalam pekerjaan sosial terutama lebih memfokuskan diri pada isu-isu global yang berkenaan dengan kebijakan lembaga atau pelaksanaan pada suatu komunitas di masyarakat.

Pekerja sosial memberikan intervensi pada organisasi, kebijakan atau sistem tertentu yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Pekerjaan sosial makro atau pekerjaan sosial komunitas merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana (*planned change*) dalam organisasi dan komunitas.

#### **2.2.4.5. Peran Pekerjaan Sosial Komunitas**

Dalam melakukan pelaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam bidang makro, seorang pekerja sosial profesional mempunyai beberapa peran sebagai berikut:

##### **1. Peranan Fasilitasi**

Peran fasilitasi adalah peran yang berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator. Keahlian yang diperlukan pekerja sosial makro dalam peranan fasilitasi antara lain:

##### **a. Animasi Sosial**

Kemampuan untuk menginspirasi, mengantusias, mengaktivasi, menstimulasi, menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan. Terdapat enam aspek yang perlu dimiliki:

- 1) Antusiasme murni terhadap tugas yang ditangani (tulus)
- 2) Komitmen (konsisten)

- 3) Integritas (dapat dipercaya)
- 4) Komunikasi
- 5) Pemahaman dan analisis (refleksi kritis)
- 6) Kepribadian (terbuka dan ramah)

b. Mediasi dan Negosiasi

Pekerja sosial masyarakat akan sering berhadapan dengan konflik-konflik kepentingan maupun konflik nilai dalam masyarakat. Dalam rangka menghadapi konflik-konflik, pekerja sosial masyarakat seringkali memerankan diri sebagai mediator. Diperlukan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pandangan kedua belah pihak yang bertikai agar bisa membantu mencari suatu upaya konsensus.

c. Dukungan

Memberikan dukungan kepada orang-orang yang terlibat dalam struktur dan aktivitas masyarakat yang ada. Dukungan itu meliputi upaya untuk memperkuat seseorang, mengakui dan menghargai nilai orang, menghargai kontribusi orang lain, menyediakan dukungan bersifat praktik, seperti menyajikan kopi/teh sesudah pertemuan. Dukungan dapat juga bersifat formal dan terstruktur seperti memberikan penghargaan dalam suatu forum pertemuan masyarakat.

d. Membangun Konsensus

Membangun kesepakatan merupakan perluasan dari mediasi. Konsensus meliputi upaya-upaya yang bertujuan untuk menitikberatkan pada tujuan bersama, pengidentifikasian kepentingan bersama, serta upaya-upaya

pemberian bantuan untuk pencapaian konsesus yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Konsensus menunjukkan suatu kegiatan yang telah disetujui dan masing-masing pihak menyepakati serta memberikan penghargaan pada perbedaan pandangan yang ada.

e. Memfasilitasi kelompok

Seorang pekerja sosial masyarakat akan memainkan peranan fasilitasi dengan suatu kelompok, apakah secara formal sebagai pemimpin, atau secara informal sebagai anggota kelompok yang mampu membantu kelompok untuk mencapai tujuannya dengan efektif.

f. Pemanfaatan Keterampilan dan Sumber-Sumber

Peran penting dari pekerja sosial masyarakat adalah untuk mengidentifikasi dan menempatkan sumber-sumber, serta membantu masyarakat untuk melihat bagaimana sumber-sumber itu dapat digunakan.

g. Pengorganisasian

Pengorganisasian digambarkan sebagai seorang yang membuat sesuatu dan terjadi. Peranan ini memerlukan peranan berfikir apa yang perlu dilakukan, dan meyakinkan bahwa hal itu terjadi.

2. Peranan Edukasi

Peranan edukasional menuntut pekerja lebih aktif dalam setting agenda.

Peranan seorang pekerja sosial masyarakat terdiri atas:

- a. Menumbuhkan kesadaran. Menumbuhkan kesadaran dimulai dengan menghubungkan pribadi dengan politik atau individu dengan struktural.

- b. Menginformasikan. Secara sederhana memberikan informasi yang relevan kepada orang/masyarakat dapat menjadi peranan yang sangat bermanfaat bagi seorang pekerja sosial masyarakat.
- c. Mengkonfrontasikan. Dalam beberapa situasi masalah, mungkin merupakan hal yang besar dan bahwa kelompok atau masyarakat tidak mampu menghadapinya, maka pekerja sosial masyarakat perlu mengkonfrontasikan kelompok dengan konsekuensi-konsekuensi.
- d. Pelatihan. Pelatihan merupakan peranan edukatif yang sangat khusus, peranan ini secara sederhana menyangkut mengajar orang-orang atau masyarakat bagaimana melakukan sesuatu.

### 3. Peranan Representasi

Peran representasi digunakan untuk menunjukkan peranan pekerja sosial masyarakat dalam berinteraksi dengan badan-badan eksternal/luar, demi kepentingan atau keuntungan masyarakat. Peranan-peranan ini antara lain :

- a. Memperoleh sistem sumber. Disatu sisi prinsip kepercayaan diri berusaha memanfaatkan sumber-sumber yang mungkin diperoleh dari dalam masyarakat, namun ada waktunya bila seorang pekerja sosial masyarakat perlu mencari sumber-sumber dari sumber eksternal.
- b. Advokasi. Disini pekerja sosial masyarakat mewakili kepentingan individu, kelompok dan masyarakat dan meletakkan kasus mereka pada urusan yang lebih baik. Peranan advokasi merupakan peranan yang sangat berkuasa, dan dengan peranan ini pekerja sosial masyarakat mudah berada/masuk dalam posisi yang berwenang.

- c. Media massa. Pekerja sosial masyarakat dalam beberapa hal perlu menggunakan media secara efektif. Peranan ini menyangkut kemampuan pekerja sosial masyarakat dalam penerbitan melakukan *interview* di radio, televisi atau media cetak atau partisipasi dalam suatu debat atau forum.
  - d. Hubungan masyarakat. Pekerja sosial masyarakat perlu menyadari tentang *image* yang perlu diproyeksikan oleh proyek masyarakat dan untuk mempromosikan gambaran atau gagasan yang tepat dalam konteks yang lebih luas.
  - e. Jaringan kerja. Jaringan kerja berarti membangun hubungan dengan banyak orang, dan mampu memanfaatkan mereka untuk mempengaruhi perubahan.
  - f. Berbagai pengetahuan dan pengalaman. Pekerja sosial perlu saling membagi pengalaman dengan orang lain, baik dengan sesama pekerja sosial masyarakat maupun dengan anggota masyarakat.
4. Peranan Teknis atau Teknikal
- a. Pengumpulan dan Analisa data. Peranan ini berkaitan dengan peranan pekerja sosial masyarakat dalam penelitian sosial. Menggunakan berbagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial untuk mengumpulkan data yang relevan dan untuk menganalisa dan menyajikannya.
  - b. Penggunaan komputer. Sangatlah penting bagi pekerja sosial masyarakat untuk mampu menggunakan komputer, selain itu penggunaan komputer dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan masyarakat untuk membantu anggota masyarakat lainnya dalam memperoleh keterampilan komputer.



- c. Presentasi lisan dan tulisan. Pekerja pekerja sosial masyarakat pasti membuat tulisan-tulisan, tulisan-tulisan ini mencakup laporan tertulis, mengeluarkan dana, laporan-laporan pertemuan, kertas diskusi dan surat-surat.
- d. Manajemen. Peranan manajemen menjadi penting pada saat pertanggungjawaban pengelolaan proyek. Pada level masyarakat, konsep-konsep seperti manajemen menengah tidak diterapkan secara normal.
- e. Kontrol Finansial. Peranan Teknik yang terakhir adalah manajemen keuangan. Dalam bidang ini, biasanya pekerja sosial masyarakat memiliki latar belakang atau pengalaman sedikit dalam hal ini, dan mungkin akan lebih baik bila ia mencari asisten yaitu orang yang memiliki keahlian akunting.